

**PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PERKEMBANGAN SEKTOR INFORMAL DALAM RANGKA PENDALAMAN MATERI PEMBELAJARAN MATA KULIAH AKUNTANSI PERBANKAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNS**

Eka Nurinah, Sri Witurachmi, Jaryanto\*

\*Pendidikan Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret  
Surakarta, 57126, Indonesia  
ekanurinah@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sistem dan mekanisme pengajuan kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading. (2) Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan jasa kredit BKK yang diberikan kepada sektor informal. (3) Untuk mengetahui keadaan sektor informal sebelum dan sesudah mendapat kredit di BKK Ampelgading. (4) Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kredit dengan teori di mata kuliah akuntansi perbankan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive* dan *snowballsampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain informan yaitu pegawai BKK dan pedagang, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) BKK Pemalang Cabang Ampelgading memiliki sistem dan mekanisme pengajuan kredit yang lebih mudah sehingga memudahkan calon nasabah untuk mengajukan kredit. (2) Pemberian kredit dari BKK Pemalang Cabang Ampelgading dimanfaatkan dengan baik oleh sektor informal perdagangan untuk menambah barang dagangan maupun peralatan dan adanya pantauan dari pihak BKK terhadap perkembangan para pedagang untuk pencapaian tujuan bersama antara pihak BKK dan pedagang. (3) Adanya perkembangan yang dialami para pedagang dalam hal peningkatan penjualan dan pendapatan setelah mendapat kredit dari BKK. Peningkatan ini ditinjau dari tingkat penjualan rata-rata sebanyak 63,2% dengan presentase kenaikan tertinggi 150% dan terendah 33%. Adanya peningkatan penjualan juga mempengaruhi pendapatan para pedagang dan meningkat menjadi 62,6%. (4) Pelaksanaan kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading sesuai dengan teori pada mata kuliah akuntansi perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peranan BKK Pemalang Cabang Ampelgading terhadap sektor informal perdagangan khususnya pedagang kecil adalah sebagai lembaga keuangan yang membantu pedagang dalam hal pemberian pinjaman modal melalui kredit dengan sistem dan mekanisme yang mudah untuk tujuan perkembangan usaha dan pemberian kredit berdampak pada peningkatan penjualan dan pendapatan bagi pedagang. Oleh karena itu, program kredit perlu dilanjutkan ke periode selanjutnya dengan adanya peningkatan pelayanan dan hubungan antara nasabah dan pihak BKK yang lebih baik.

Kata kunci : badan kredit kecamatan, sektor informal, perkembangan usaha, perhimpunan dana

## ABSTRACT

*The objectives of research were (1) to find out the system and mechanism of loan application in Badan Kredit Kecamatan Pemalang Cabang Ampelgading (Ampelgading Branch of Sub-district Loan Agency), (2) to find out the form of loan service utilization of loan service given by the Badan Kredit Kecamatan to the informal sector (3) to find out the condition of informal sector business before and after receiving loan in Badan Kredit Kecamatan Pemalang Cabang Ampelgading, and (4) to find out the compatibility of the loan issuance implementation in Badan Kredit Kecamatan to the theory taught in banking accounting course.*

*This study used a descriptive qualitative research. The sampling techniques used were purposive sampling and snowball sampling. The data sources used in this study were interview with informant, place or location, and document or archive. The data collection was conducted using observation, interview, and documentation technique. Data validation was conducted using source and method triangulation.*

*Considering the result of research, it could be concluded that (1) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pemalang Cabang Ampelgading had an easier system and mechanism of loan application thereby facilitating the prospect customers apply for the loan. (2) The loan issuance in BKK Pemalang Cabang Ampelgading was utilized well by trading informal sector for both increasing merchandise and increasing the business equipments and facilities; there was BKK management's supervision on the development of sellers to achieve their mutual objective (BKK and sellers). (3) There was a development encountered by the sellers in the term of increased sales and income after receiving loan from BKK. This improvement could be seen from the average sale level of 63.2% with the highest increase of 15% and the lowest one of 33%. The increase of sales also increased the sellers' income by 62.6%. (4) The loan implementation in BKK Pemalang Cabang Ampelgading had been consistent with the theory in banking accounting course.*

*Based on the result of this research we can know that the role of BKK Pemalang Cabang Ampelgading for the commerce informal sector especially for small merchant is as a financial institutions that help the merchant to lend the capital through the credit system and an easy mechanism to develop the business and credit provision's impact on sales increase and revenue for merchants. Therefore, it need to be continued into the next period with an increase in service and better relationship between customer and BKK.*

*Keywords: badan kredit kecamatan (sub-district loan agency), informal sector, business development fundraising.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Agar mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, suatu negara melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah

satunya yaitu bidang ekonomi. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui berbagai bentuk program pembangunan dengan bertumpu

pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai motivasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Memasuki era globalisasi abad ke 21 titik berat pembangunan nasional ditekankan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama suatu negara dalam bentuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi SDA maupun SDM. Adanya pemanfaatan sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan potensi SDM dalam mengolah sumber daya alam, sehingga suatu negara dapat meningkatkan ekspor barang dalam negeri.

Masalah utama yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih (*unskilled*) bagi pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban pembangunan, justru menjadi modal pembangunan. Salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dewasa ini adalah masyarakat miskin yang mempunyai usaha namun lemah dalam permodalan serta lemah dalam pengetahuan dan

keterampilan dan sering kali juga lemah di dalam semangat dan keinginan untuk maju. Di Negara Sedang Berkembang, sekitar 30-70 persen populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal.

Kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk pedesaan berkurang dari tahun ke tahun karena terjadi urbanisasi. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup (*survival*). Mereka tinggal di pemukiman kumuh dan pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. Namun jika urbanisasi terjadi terus menerus maka akan terjadi ledakan penduduk di daerah perkotaan. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan perekonomian di tiap daerah. Sektor informal yang dapat dikembangkan di daerah pedesaan adalah perdagangan.

Oleh karena itu untuk membantu sektor perdagangan, pemerintah melalui sektor perbankan membantu sektor perdagangan dengan adanya pemberian modal melalui kredit. Sektor perbankan memiliki peran yang strategis bagi sektor perdagangan. Hasibuan (2002: 1-2) berpendapat bahwa bank sangat penting

dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah:

1. Pengumpul dana dari SSU (*surplus spending unit*) dan penyalur kredit kepada DSU (*defisit spending unit*);
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis;
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Data yang diambil dari Bank Indonesia menunjukkan perkembangan kredit di Jawa Tengah yang cukup signifikan. Perkembangan kredit di Jawa Tengah mengalami peningkatan tiap bulannya. Jumlah masyarakat yang mengambil kredit di provinsi Jawa Tengah dari bulan Maret – Agustus 2013 adalah Rp74.217.357.000. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami perkembangan kredit yang cukup signifikan adalah Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki data perkembangan kredit dari bulan Maret - Agustus 2013 mencapai Rp 865.104.939.

Kecamatan Ampelgading merupakan kecamatan yang berada dalam

wilayah provinsi Jawa Tengah dan berada di Kabupaten Pemalang. Kecamatan Ampelgading termasuk dalam kecamatan yang belum maju secara administrasi dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama, sektor informal perdagangan juga berkembang di kecamatan Ampelgading dalam bentuk pasar. Rata-rata penjual di pasar tersebut adalah penjual dengan barang dagangan sedikit dan modal yang kecil. Hal ini membuat para pedagang kesulitan untuk memenuhi dana/modal yang digunakan untuk pengembangan usahanya. Salah satu instrumen penunjang perekonomian dalam pemenuhan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi masyarakat dalam lingkup kecamatan tertentu adalah kredit kecamatan. Kredit kecamatan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan pinjaman/kredit di Badan Kredit Kecamatan (BKK). Kredit kecamatan dari BKK bersifat mudah dan murah. Sektor informal dapat mengajukan kredit lunak di BKK dengan angsuran yang murah serta dapat mengangsur dengan sistem potongan dari tabungan tamades yang dimiliki oleh nasabah. Tabungan tamades merupakan singkatan dari Tabungan Masyarakat Desa. Tamades merupakan tabungan sukarela yang diperuntukan bagi penabung perorangan, perusahaan, dinas instansi, LSM, badan

usaha, dan yayasan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tamades dibuat pada saat pengajuan kredit diterima oleh pihak BKK dan dapat digunakan sebagai tabungan bagi nasabah BKK khususnya sektor informal. Para pedagang kecil dapat mengajukan kredit di BKK dengan jaminan yang lebih kecil sehingga dapat memenuhi kebutuhan dana dan modal untuk meningkatkan usahanya.

Kredit kecamatan yang diperuntukkan bagi sektor informal untuk tujuan perkembangan usaha dapat menjadi data yang tepat bagi lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. Pengajuan dan mekanisme kredit serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kredit kecamatan dapat menjadi pendalaman materi untuk mata kuliah yakni akuntansi perbankan. Kredit kecamatan yang diajukan oleh sektor informal nantinya dapat membantu sektor informal untuk perkembangan usahanya karena adanya kredit kecamatan dapat meningkatkan permodalan yang sebelumnya masih menjadi masalah umum bagi sektor informal. Data-data seperti mekanisme pengajuan kredit yang diperoleh dari Badan Kredit Kecamatan dapat menjadi suatu materi pengayaan bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah

akuntansi perbankan khususnya pada materi Penghimpunan Dana. Data tersebut dapat membantu mahasiswa agar dapat mendalami materi perkuliahan akuntansi perbankan karena selain teori dari buku juga adanya data yang diperoleh langsung dari lembaga keuangan sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi pada mata kuliah akuntansi perbankan dengan baik dan lebih mendalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme pengajuan kredit di Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pemalang Cabang Ampelgading? (2) Bagaimana pemanfaatan kredit dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang diberikan kepada sektor informal? (3) Bagaimana perkembangan usaha sektor informal sebelum dan sesudah adanya pemberian kredit kecamatan dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pemalang Cabang Ampelgading? (4) Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan pemberian kredit di BKK dengan teori di mata kuliah akuntansi perbankan?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sistem dan mekanisme pengajuan kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading (2) Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan jasa kredit BKK yang diberikan kepada masyarakat khususnya sektor informal. (3)

Untuk mengetahui bagaimana keadaan perkembangan usaha sektor informal sebelum dan sesudah mendapat kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading (4) Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan pemberian kredit di BKK dengan teori di mata kuliah akuntansi perbankan.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan, tempat atau lokasi, dokumen atau arsip, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan BKK (kepala BKK, kasi pemasaran, seksi kredit) serta nasabah BKK yakni pedagang. Dokumen atau arsip yang digunakan adalah form pengajuan kredit oleh nasabah yang berisi surat penyerahan barang, surat penyerahan jaminan (sertifikat dan kendaraan bermotor), surat kuasa menjual dan memindahkan hak (sertifikat dan kendaraan bermotor), surat pernyataan dan surat perintah, daftar isian kredit, surat kuasa, dan form permohonan kredit. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Prosedur penelitian terdiri dari (1) Tahap Pemilihan

Judul Penelitian, (2) Tahap Menyusun Proposal, (3) Tahap Perijinan ke Obyek Penelitian, (4) Tahap Pengumpulan Data, (5) Tahap Analisis Data, dan (6) Tahap Penyusunan laporan penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dilakukan dengan informan sebanyak 10 nasabah yang merupakan pedagang kecil yang berada di lingkup wilayah pasar Ampelgading. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa sistem dan mekanisme pengajuan kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dari pengajuan kredit sampai pencairan kredit sehingga memudahkan nasabah untuk mendapatkan kredit. Pengajuan kredit dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang dibutuhkan sudah lengkap. Setelah mengajukan kredit di BKK, pihak BKK akan mensurvey lokasi, kemudian bersama direksi akan memutuskan apakah berhak mendapat kredit atau tidak. Jika kredit yang diajukan diterima, maka nasabah bisa datang ke BKK untuk mengurus langkah selanjutnya.

Adanya kredit dari BKK Pemalang Cabang Ampelgading dimanfaatkan dengan baik dan efektif oleh para pedagang dengan tujuan untuk peningkatan usaha. Pedagang menggunakan modal tersebut untuk

menambah barang dagangan serta menambah peralatan yang menunjang para pedagang dalam berjualan. Selain itu para pedagang juga menambah ragam barang dagangan sehingga pedagang dapat menjual 2-3 barang dagangan, hal ini menguntungkan bagi para pedagang karena dapat meningkatkan tingkat penjualan dan pendapatan mereka. Pihak BKK selalu memperhatikan 5C (*Character – Capacity – Condition – Colateral – Capability*) seorang nasabah. Hal ini membantu BKK dalam menyeleksi nasabah agar diperoleh nasabah yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab dalam hal setoran dan penggunaan dana kredit dari BKK. Pihak BKK juga memantau kegiatan para pedagang apakah modal yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif atau tidak oleh para pedagang. Selain itu pihak BKK juga membantu para pedagang dengan memberikan penyuluhan tentang manajemen pengelolaan dana yang baik dan dapat dipahami oleh nasabah khususnya pedagang kecil sehingga dapat tercapai tujuan bersama antara pedagang dan pihak BKK.

Terdapat perbedaan yang signifikan yang dialami pedagang sebelum dan sesudah mendapat kredit dari BKK. Pedagang kecil sebagian besar memiliki

modal yang sedikit sehingga barang yang dijual juga terbatas. Hal ini menyebabkan para pedagang hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dan terkadang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang dagangan tanpa mendapat keuntungan. Setelah para pedagang menjadi nasabah dan mendapat kredit dari BKK, mereka mendapatkan modal tambahan yang digunakan untuk menambah barang dagang. Wawancara dilakukan kepada 10 informan yakni nasabah kredit BKK yang merupakan pedagang kecil. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat penjualan dari nasabah di BKK wilayah Kecamatan Ampelgading khususnya pedagang kecil/bakul mengalami peningkatan setelah mendapatkan kredit dari BKK. Tingkat penjualan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 63,2% dengan persentase kenaikan tertinggi 150% dan persentase kenaikan terendah sebesar 33%. Adanya peningkatan penjualan juga disertai dengan adanya peningkatan pendapatan bagi pedagang sebesar 62,6%. Kenaikan tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap tingkat tabungan bagi sebagian pedagang, namun ada juga pedagang yang mengalami peningkatan pendapatan namun belum dapat meningkatkan tabungannya. Hal ini

dikarenakan beberapa faktor yaitu meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari sehingga pendapatan yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bentuk pencatatan akuntansi untuk kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading menggunakan PA-BPR yang juga digunakan pada BPR-BKK. PA-BPR menggunakan SAK-ETAP dan PAPI yang disesuaikan untuk Badan Kredit Kecamatan (BKK). Perbedaannya hanya terdapat pada pelaporan saja, jika BKK pelaporannya ke pemerintah provinsi dan BPR-BKK pelaporannya langsung ke Bank Indonesia (BI). Pencatatan untuk bab kredit di BKK menggunakan PA-BPR yang dibuat oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan pencatatan akuntansi perbankan di Indonesia sehingga pencatatan antara BKK tidak jauh berbeda dengan pencatatan akuntansi pada bank umum lainnya sehingga pencatatan akuntansi untuk bab kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading sesuai dengan teori di mata kuliah akuntansi perbankan.

## KESIMPULAN

Peranan Badan Kredit Kecamatan (BKK) untuk perkembangan sektor informal mempunyai peran yang sangat besar terhadap sektor informal perdagangan khususnya untuk pedagang kecil. Sistem dan mekanisme untuk pengajuan kredit di BKK sangat mudah

dan cepat sehingga membantu nasabah khususnya pedagang dalam memperoleh kredit yang dapat digunakan untuk modal usaha. Kredit dari BKK Pemalang Cabang Ampelgading dimanfaatkan secara efektif oleh para pedagang untuk menambah barang dagangan dan menambah peralatan yang dapat menunjang usaha dagangnya. Pihak BKK selalu memperhatikan 5C (*Character – Capacity – Condition – Colateral – Capability*) seorang nasabah. Hal ini bertujuan agar nasabah yang diberikan kredit merupakan nasabah yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab dalam hal setoran dan penggunaan dana kredit dari BKK. Pihak BKK selalu memantau perkembangan nasabah dan memantau apakah kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk keperluan usaha atau tidak. Selain itu BKK juga membantu para pedagang dengan memberi penyuluhan tentang pengelolaan dana kredit yang baik namun dengan cara sederhana yang mudah dipahami oleh pedagang sehingga tujuan bersama antara pedagang dengan BKK dapat tercapai.

Terdapat perbedaan yang signifikan yang dialami pedagang sebelum dan sesudah mendapat kredit dari BKK. Pedagang kecil sebagian besar memiliki modal yang sedikit sehingga barang yang dijual juga terbatas. Hal ini menyebabkan para pedagang hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dan terkadang

hasil penjualan digunakan untuk membeli barang dagangan tanpa mendapat keuntungan. Setelah para pedagang menjadi nasabah dan mendapat kredit dari BKK, mereka mendapatkan modal tambahan yang digunakan untuk menambah barang dagang. Wawancara dilakukan kepada 10 informan yakni nasabah kredit BKK yang merupakan pedagang kecil. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat penjualan dari nasabah di BKK wilayah Kecamatan Ampelgading khususnya pedagang kecil/bakul mengalami peningkatan setelah mendapatkan kredit dari BKK. Tingkat penjualan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 63,2% dengan persentase kenaikan tertinggi 150% dan persentase kenaikan terendah sebesar 33%. Adanya peningkatan penjualan juga disertai dengan adanya peningkatan pendapatan bagi pedagang sebesar 62,6%. Kenaikan tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap tingkat tabungan bagi sebagian pedagang, namun ada juga pedagang yang mengalami peningkatan pendapatan namun belum dapat meningkatkan tabungannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari sehingga pendapatan yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bentuk pencatatan akuntansi untuk kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading menggunakan PA-BPR yang juga digunakan pada BPR-BKK. PA-BPR menggunakan SAK-ETAP dan PAPI yang disesuaikan untuk Badan Kredit Kecamatan (BKK). Perbedaannya hanya terdapat pada pelaporan saja, jika BKK pelaporannya ke pemerintah provinsi dan BPR-BKK pelaporannya langsung ke Bank Indonesia (BI). Pencatatan untuk bab kredit di BKK menggunakan PA-BPR yang dibuat oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan pencatatan akuntansi perbankan di Indonesia sehingga pencatatan antara BKK tidak jauh berbeda dengan pencatatan akuntansi pada bank umum lainnya sehingga pencatatan akuntansi untuk bab kredit di BKK Pemalang Cabang Ampelgading sesuai dengan teori di mata kuliah akuntansi perbankan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, Mustofa. 2003. *Peranan Badan Kredit Kecamatan dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan*. Surakarta : UNS
- Anggoro Putro, Bagus. 2011. *Analisa Pengaruh Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar*. Surakarta : UMS

- Arbi, Syarif. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Jakarta : Djambatan
- Azwar, Saifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Gde Kajeng Baskara, I. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18, (2), 120.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/MK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 dan Nomor 1238/KMK.00/1989 tanggal 14 November 1989 *Tentang Perubahan-perubahan mendasar tentang BPR*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1988 *Tentang Perubahan Mendasar tentang Badan Perkreditan Rakyat (BPR)*
- Latumaerissa, Julius R. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Leibo, Jefta. 2004. *Problem Perkotaan dan Konflik Sosial*. Yogyakarta : INPEDHAM
- Moleong, Lexy.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 *Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah*
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 *Tentang Badan Kredit Kecamatan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 *Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat*
- Prastuti, Ratih. 2010. *Peranan Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan di wilayah kecamatan Jebres kota Surakarta tahun 2010*. Surakarta : UNS
- Rodoni, Ahmad. 2007. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : CSES Press
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press
- Surat Keputusan Direktur Nomor 581/03/SK.DIR/2012 Tanggal 02 Januari 2012 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 September 1969 *Tentang Pembentukan LPPD tingkat Kecamatan dan pembentukan BKK dalam Unit Operasional LPPD*

Triandaru, S. & Budisantoso, T. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat

Mengembangkan Usaha Mikro di wilayah kerjanya. *Diponegoro Journal of Economic*, 2, (1), 1-10.

Trio Utomo, C. & Hendra Setiawan, A. (2013). Analisis Peran Kredit Mikro dari PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dalam Upaya

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

## PENGESAHAN

Artikel ini telah dibaca dan direkomendasikan oleh pembimbing I dan pembimbing II.

Surakarta, Juli 2015

Pembimbing I



Dra. Sri Witurachmi, MM

NIP.19540614 198103 2 001

Pembimbing II



Jaryanto, S.Pd, M.Si

NIP.19760909 200501 1 001